

TINGKAT KUALITAS LAHAN PERTANIAN SEBAGAI KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B) DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

Widia Rakhma Wati

Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
widiarakhmawati@gmail.com

Dr. Nugroho Hari Purnomo, S.P., M.Si.

Dosen Pembimbing Mahasiswa

Abstrak

Pertanian merupakan sumber pekerjaan utama yang ada di Indonesia. Tanah pertanian yang subur karena terletak di iklim tropis. Lahan yang seharusnya dijadikan lahan pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan Negara, banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri dengan berdirinya pabrik. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis potensi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Sidoarjo dan menganalisis hasil KP2B dalam sudut pandang geografis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Populasi pada penelitian ini adalah luas lahan pertanian yang mampu menghasilkan produksi tanaman pangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data dari instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan skoring dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan belas kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang termasuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria tinggi ada tiga kecamatan, dua belas kecamatan masuk dalam kriteria sedang, dan tiga kecamatan masuk dalam kriteria rendah. Kecamatan dengan kategori tinggi sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yaitu Kecamatan Krembung sebesar 6,1%, Kecamatan Wonoayu sebesar 6,1%, dan Kecamatan Taman sebesar 5,8%. Kecamatan yang termasuk dalam kategori sedang adalah Kecamatan Sidoarjo, Candi, Porong, Jabon, Krian, Balongbendo, Tarik, Prambon, Waru, Gedangan, Sedati, dan Sukodono dengan tingkat presentase 5,3 % - 5,6%. Kecamatan yang termasuk dalam kategori KP2B rendah adalah Kecamatan Buduran, Tulangan, dan Tanggulangin dengan presentase sebesar 5,0% - 5,3% .

Kata Kunci: Pertanian berkelanjutan, Lahan Pertanian, KP2B

Abstract

Agriculture is the main source of employment in Indonesia. This is due to the fertile soil because it is located in a tropical climate. The amount of land that should be made into agricultural land to meet the country's food needs, many switch functions to an industrial area with factories established.

Based on Government Efforts issued through the Law of the Republic of Indonesia No. 41 of 2009 concerning Protection of LP2B, is used to maintain agricultural land that has great potential. The purpose of this study is to determine the potential of KP2B in Sidoarjo and analyze the results of KP2B in a geographical perspective.

The method in this research is descriptive quantitative. Data is collected by submitting an application letter to several related agencies and data calculation and analysis is performed. The results obtained are in the form of figures (in percent) of the potential level of KP2B which is an accumulation of the results of the LP2B and LCP2B.

Based on the results of the calculation of KP2B, out of 18 Subdistricts in Sidoarjo Regency, 3 Districts are included in the high criteria, 12 Districts are included in the medium criteria, and 3 Districts are included in the low criteria. The sub-districts included in the high category as KP2B are Krembung sub-district at 6.1%, Wonoayu sub-district 6.1%, and Taman District 5.8%. The sub-districts included in the low category as KP2B are Buduran, Tulangan and Tanggulangin, with a percentage of 5.0% - 5.3%.

Keywords: Sustainable Agriculture, Agricultural Land, KP2B

PENDAHULUAN

Pemanfaatan lahan pertanian yang tidak semestinya menjadikan suatu hambatan bagi terciptanya peningkatan ketahanan pangan negara. Lahan pertanian yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warga negara, beralih fungsi sesuai dengan kebijakan masyarakat sendiri. Alih fungsi lahan tersebut membuat dampak yang berkelanjutan bagi hasil pertanian dan bersifat tetap dibandingkan dampak yang ditimbulkan akibat serangan hama penyakit pada tanaman pertanian (Zulfikar, Barus, & Sutandi, 2013:22).

Alih fungsi lahan yang sering terjadi di kota-kota besar yang tersebar di Indonesia, diakibatkan oleh perkembangan urbanisasi yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Masyarakat akan berpindah ke wilayah perkotaan yang memiliki potensi yang besar bagi dirinya dalam segi ekonomi. Pulau Jawa adalah destinasi favorit kaum urban karena pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain di luar Pulau Jawa (Tjiptoherijanto, 1999:67)

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penyumbang beras nasional utama. Luas lahan pertanian di wilayah Jawa Timur masih cukup besar yaitu sekitar 1.176.650 ha, baik untuk lahan irigasi maupun non irigasi (BPS, 2017:24). Lahan pertanian yang cukup luas mengakibatkan semakin tingginya tingkat urbanisasi, terutama di wilayah Ibukota Jawa Timur dan sekitarnya.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo dijadikan sebagai lumbung padi terbesar di Jawa Timur karena luas wilayahnya sekitar 634,4 km², selain itu semua pasokan padi di Jawa Timur masuk ke dalam Kabupaten Sidoarjo. Luas lahan pertanian Sidoarjo sebesar 36.000 ha secara keseluruhan, apabila tidak diperhatikan dan kurangnya pemanfaatan membuat lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo hanya 22.000 ha yang aktif digarap dan sisanya dibiarkan menganggur (Syairwan, 2017:54).

Lahan kosong yang awalnya berpotensi sebagai lahan pertanian, lambat laun akan menjadi salah satu dari sekian banyak lahan untuk dibangun pabrik atau kegunaan lain yang tidak berhubungan dengan pertanian dan tidak menghasilkan peningkatan ketahanan pangan. Pertambahan penduduk setiap tahun dapat mengakibatkan lahan pertanian yang dibiarkan menganggur atau tidak aktif digarap akan beralih fungsi menjadi perumahan atau pabrik yang didirikan dengan alasan pertambahan pekerja.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan, digunakan dalam menetapkan lahan

pertanian yang ada sehingga mampu digunakan secara optimal dan lebih baik dalam meningkatkan ketahanan pangan Negara. Ketersediaan pangan masyarakat tercukupi dan tersebar merata, sehingga mampu dijangkau bahkan oleh rakyat kecil sekalipun.

Upaya Pemerintah yang dikeluarkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), digunakan untuk mempertahankan lahan pertanian yang berpotensi besar dalam memenuhi kebutuhan pangan Negara dengan mengendalikan laju alih fungsi serta melindungi lahan pertanian saat ini hingga masa depan (Pridasari, 2017:56).

Upaya Pemerintah diwujudkan dalam mempertahankan lahan pertanian yang berpotensi dalam memenuhi kebutuhan pangan. Penelitian ini akan melakukan penentuan lahan-lahan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B), guna meminimalisir alih fungsi lahan yang hanya melihat lahan kosong tanpa mengetahui kawasan tersebut berpotensi besar bagi keberlangsungan hidup suatu Negara. Penentuan dan penetapan lahan pertanian menurut LP2B dibagi menjadi tiga komponen yaitu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) (Christian, Rustiadi, & Barus, 2012:60).

Berdasarkan latar belakang di atas akan dilakukan penelitian dengan judul “**Tingkat Kualitas Lahan Pertanian Sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur**”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat potensi lokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Populasi pada penelitian ini adalah luas lahan pertanian yang mampu menghasilkan produksi tanaman pangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data dari instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan hasil skoring dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN

1. Luas Lahan Pertanian

Penentuan luas lahan pertanian di wilayah Sidoarjo dilakukan dengan menggunakan peta RBI. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) telah ditentukan titik wilayah mana saja yang termasuk dalam lahan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik dan luas area pertanian di Kabupaten Sidoarjo ada 447 titik lokasi pertanian yang tersebar pada 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo. Luas lahan pertanian setiap kecamatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Luas Lahan Pertanian Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2018

Kecamatan	Luas Lahan Tahun 2017 (ha)	Luas Lahan Tahun 2018 (ha)
Sidoarjo	475	475
Buduran	584	570
Candi	1.043	1.043
Porong	840	810
Krembung	1.816	1.816
Tulangan	1.735	1.735
Tanggulangin	1.428	1.410
Jabon	1.465	1.458
Krian	1.146	1.124
Balombangendo	1.642	1.631
Wonoayu	2.037	2.037
Tarik	2.119	2.117
Prambon	1.992	1.992
Taman	660	660
Waru	72	72
Gedangan	687	633
Sedati	613	613
Sukodono	1.498	1.494

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Kecamatan Tarik mempunyai luas lahan pertanian tertinggi sebesar 2.119 hektar, sedangkan luas lahan pertanian terendah ada pada Kecamatan Waru yakni 72 hektar. Lahan pertanian pada tahun 2018 Kecamatan Tarik masih menjadi pemilik lahan yang paling luas yakni sebesar 2.117 hektar. Kecamatan yang memiliki luas lahan pertanian terendah pada tahun 2018 adalah Kecamatan Waru.

2. Jenis Pengairan

Penentuan jenis pengairan pada 447 lokasi pertanian yang ada di Kabupaten Sidoarjo, hanya sebagian kecil yang termasuk dalam jenis pertanian tadah hujan yaitu sebanyak 13 area pertanian.

3. Intensitas Penanaman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperlukan dalam menentukan intensitas penanaman pada setiap kecamatan yaitu akumulasi data luas panen dalam satu tahun dan data luas tanam dalam sekali masa tanam. Intensitas penanaman dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 Intensitas Penanaman Area Pertanian di Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan	Luas Tanam 2018 (ha)	Luas Panen 2018 (ha)
Sidoarjo	475	997
Buduran	570	1.006
Candi	1.043	1.895
Porong	810	1.173
Krembung	1.816	2.397
Tulangan	1.735	1.749
Tanggulangin	1.410	2.377
Jabon	1.458	2.232
Krian	1.124	1.873
Balombangendo	1.631	2.204
Wonoayu	2.037	2.721
Tarik	2.117	3.298
Prambon	1.992	2.396
Taman	660	1.415
Waru	72	132
Gedangan	633	1.091
Sedati	613	1.011
Sukodono	1.494	2.764

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa luas tanam tertinggi tahun 2018 pada Kecamatan Tarik sebesar 2.117 hektar dengan luasan panen sebesar 3.298 hektar. Luas tanam terendah pada tahun 2018 berada di Kecamatan Waru dengan luasan panen sebesar 132 hektar.

4. Swasembada Pangan

Perhitungan untuk menentukan swasembada pangan dilakukan pada setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hasil perhitungan swasembada pangan akan masuk dalam dua kategori yaitu surplus atau defisit. Hasil yang didapatkan bernilai positif atau sama dengan nol, maka swasembada beras masuk dalam kategori surplus. Hasil yang didapatkan negatif maka masuk dalam kategori defisit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Swasembada beras dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo hanya 5 kecamatan yang mengalami surplus dan 13 kecamatan lain mengalami defisit. Swasembada beras di Kabupaten Sidoarjo dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3 Swasembada Beras di Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan	Swasembada Beras	Keterangan
Sidoarjo	-20.202.419	Defisit
Buduran	-8.155.020	Defisit
Candi	-12.141.616	Defisit
Porong	-4.148.630	Defisit
Krembung	421.746	Surplus
Tulangan	-2.918.500	Defisit
Tanggulangin	-4.191.976	Defisit
Jabon	354.286	Surplus
Krian	-8.832.090	Defisit
Balombangendo	-706.785	Defisit
Wonoayu	482.342	Surplus
Tarik	1.721.744	Surplus
Prambon	695.225	Surplus
Taman	-21.684.890	Defisit

Kecamatan	Swasembada Beras	Keterangan
Waru	-25.987.725	Defisit
Gedangan	-12.649.672	Defisit
Sedati	-8.190.808	Defisit
Sukodono	-6.908.560	Defisit

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kecamatan Tarik mempunyai swasembada beras surplus dengan nilai 1.721.744, sedangkan Kecamatan

5. Laju Konversi Lahan

Penentuan laju konversi lahan, dilakukan dengan menghitung seberapa besar penyusutan lahan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Hasil positif atau sama dengan nol maka laju konversi lahan termasuk dalam positif, tapi jika hasil yang didapatkan sebaliknya atau sama negatif maka laju konversi lahan termasuk dalam negatif yang artinya lahan tersebut mengalami penyusutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo bernilai negatif atau bisa dikatakan lahan mengalami penyusutan. Hasil laju konservasi lahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4 Laju Konversi Lahan

Kecamatan	Laju Konversi Lahan (V)	Keterangan
Sidoarjo	0	Positif
Buduran	-2,4	Negatif
Candi	0	Positif
Porong	-3,6	Negatif
Krembung	0	Positif
Tulangan	0	Positif
Tanggulangin	-1,3	Negatif
Jabon	-0,5	Negatif
Krian	-1,2	Negatif
Balombangendo	-0,7	Negatif
Wonoayu	0	Positif
Tarik	-0,1	Negatif
Prambon	0	Positif
Taman	0	Positif
Waru	0	Positif
Gedangan	-7,9	Negatif
Sedati	0	Positif
Sukodono	-0,3	Negatif

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Tabel 4 menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki laju konversi lahan positif adalah Kecamatan Sidoarjo, Candi, Krembung, Tulangan, Wonoayu, Prambon, Taman, Waru dan Sedati dengan nilai V adalah nol. Kecamatan sisanya mengalami laju konversi lahan negatif.

6. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperlukan dalam skoring LCP2B meliputi luas lahan pertanian, jenis pengairan, dan intensitas penanaman. Klasifikasi interval digunakan untuk menentukan kriteria area Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) rendah,

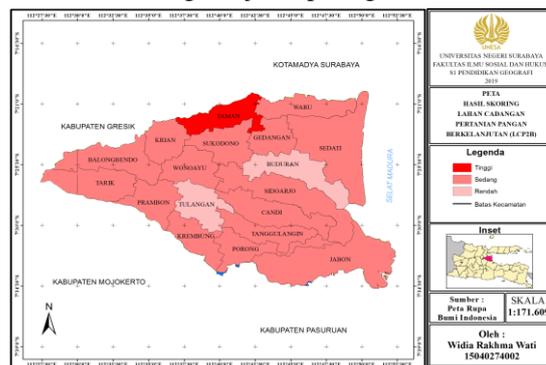
sedang, atau tinggi. Hasil skoring LCP2B dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Skoring LCP2B

Kecamatan	Luas Lahan	Jenis Pengairan	Intensitas Penanaman	Total Skoring	Kriteria
Sidoarjo	2,6	1,9	2	6,5	Sedang
Buduran	2,3	1,9	2	6,2	Rendah
Candi	2,6	2	2	6,6	Sedang
Porong	2,6	2	2	6,6	Sedang
Krembung	2,7	2	2	6,7	Sedang
Tulangan	2,7	2	1	5,7	Rendah
Tanggulangin	2,7	2	2	6,7	Sedang
Jabon	2,3	2	2	6,3	Sedang
Krian	2,7	1,8	2	6,5	Sedang
Balombangendo	2,8	1,9	2	6,7	Sedang
Wonoayu	2,6	2	2	6,6	Sedang
Tarik	2,4	2	2	6,4	Sedang
Prambon	2,3	2	2	6,3	Sedang
Taman	2,7	1,8	3	7,5	Tinggi
Waru	2,7	2	2	6,7	Sedang
Gedangan	2,7	2	2	6,7	Sedang
Sedati	2,5	2	2	6,5	Sedang
Sukodono	2,6	2	2	6,6	Sedang

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa kecamatan Taman memiliki kriteria LCP2B tinggi dengan total skoring 7,5. Kecamatan Tulangan memiliki kriteria LCP2B rendah dengan total skoring 5,7. Peta hasil skoring disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1 Peta Hasil Skoring Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019)

7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang dibutuhkan dalam penentuan LP2B meliputi jenis pengairan, intensitas penanaman, swasembada pangan, laju konversi lahan, jarak dari jalan, intensitas curah hujan dan luas lahan pertanian. Skoring dilakukan untuk penentuan area pertanian yang masuk dalam kriteria LP2B, kemudian menghitung interval untuk mengklasifikasikan kriteria area tersebut masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) rendah, sedang, atau tinggi. Hasil skoring LP2B dapat disajikan pada tabel berikut:

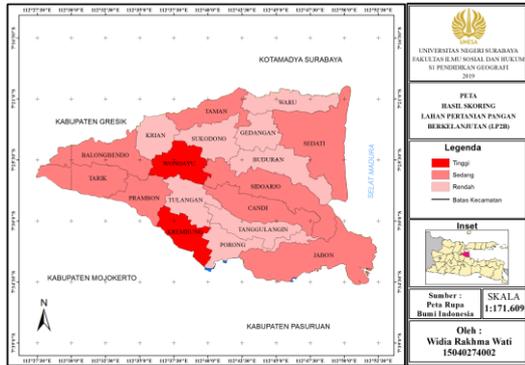
Tabel 6 Hasil Skoring LP2B

Kecamatan	Total Skoring	Kriteria
Sidoarjo	14,2	Sedang
Buduran	13,2	Rendah
Candi	14,5	Sedang
Porong	13,8	Rendah
Krembung	16,0	Tinggi
Tulangan	12,8	Rendah
Tanggulangin	13,1	Rendah
Jabon	14,3	Sedang
Krian	13,7	Rendah
Balombangendo	14,2	Sedang
Wonoayu	16,1	Tinggi

Kecamatan	Total Skoring	Kriteria
Tarik	14,7	Sedang
Prambon	14,7	Sedang
Taman	14,0	Sedang
Waru	13,2	Rendah
Gedangan	13,3	Rendah
Sedati	13,9	Sedang
Sukodono	13,3	Rendah

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kecamatan Wonoayu memiliki kriteria LP2B tertinggi dengan total skoring 16,1. Kecamatan Tulangan memiliki kriteria LP2B rendah dengan total skoring 12,8. Peta hasil skoring disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2 Peta Hasil Skoring Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019)

8. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

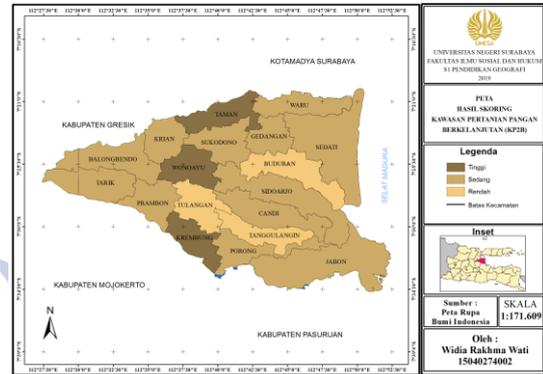
Hasil skoring pada kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), maka dalam menentukan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan mengakumulasi hasil skoring dari kedua kriteria tersebut. Perhitungan interval untuk mengklasifikasikan kriteria area tersebut masuk dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) rendah, sedang, atau tinggi. Hasil kriteria KP2B dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Skoring KP2B

Kecamatan	\sum LCP2B	\sum LP2B	KP2B (%)	Kriteria
Sidoarjo	6,5	14,2	5,6	Sedang
Buduran	6,2	13,2	5,2	Rendah
Candi	6,6	14,5	5,7	Sedang
Porong	6,6	13,8	5,5	Sedang
Kremlung	6,7	16	6,1	Tinggi
Tulangan	5,7	12,8	5,0	Rendah
Tanggulangin	6,7	13,1	5,3	Rendah
Jabon	6,3	14,3	5,6	Sedang
Krian	6,5	13,7	5,4	Sedang
Balombendo	6,7	14,2	5,6	Sedang
Wonoayu	6,6	16,1	6,1	Tinggi
Tarik	6,4	14,7	5,7	Sedang
Prambon	6,3	14,7	5,7	Sedang
Taman	7,5	14	5,8	Tinggi
Waru	6,7	13,2	5,4	Sedang
Gedangan	6,7	13,3	5,4	Sedang
Sedati	6,5	13,9	5,5	Sedang
Sukodono	6,6	13,3	5,4	Sedang
Jumlah	38,8	35,4	100	

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kecamatan Kremlung memiliki kriteria KP2B tinggi dengan persentase sebesar 6,1%. Kecamatan Tulangan memiliki kriteria KP2B rendah dengan persentase sebesar 5,0%. Peta hasil skoring dapat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3 Peta Hasil Skoring Kawasan Pertanian Pangan (Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019)

PEMBAHASAN

1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

a. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)

Penentuan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan berdasarkan pada tiga variabel dasar, diantaranya luasan lahan, potensi teknis dan kesesuaian lahan yang difokuskan pada jaringan air yang dimiliki pada setiap area lahan dan intensitas penanaman yang bisa dilakukan pada area tersebut.

Data yang telah ada dan hasil perhitungan skoring dari luas lahan pertanian, jenis pengairan, dan intensitas penanaman dari berbagai titik area lahan yang tersebar di 18 kecamatan yang tersebar di kabupaten Sidoarjo, maka sebagian besar area lahan di kabupaten Sidoarjo masuk dalam area berkategori sedang sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Penentuan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) merupakan lahan potensial yang harus dilindungi pemanfaatannya agar ketersediannya tetap terkendali dan dapat dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di masa yang akan datang.

Hasil dari skoring yang didapat untuk LCP2B, dari 18 kecamatan yang ada hanya terdapat satu kecamatan yang masuk dalam LCP2B kategori tinggi, yaitu Kecamatan Taman. Setiap area yang ada di Kecamatan

Taman, rata-rata menggunakan jaringan irigasi, dengan luas area pertanian cukup luas dan rata-rata intensitas penanaman sebanyak 3 kali

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (L2PB)

Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan berdasarkan pada tujuh variabel dasar yaitu luasan lahan, potensi teknis dan kesesuaian lahan yang difokuskan pada jaringan air yang dimiliki pada setiap area lahan, swasembada pangan, laju konversi lahan, jarak dari jalan, intensitas curah hujan dan intensitas penanaman yang bisa dilakukan pada area tersebut.

Data yang telah ada dan hasil perhitungan skoring dari luas lahan pertanian, jenis pengairan, dan intensitas penanaman dari berbagai titik area lahan yang tersebar di 18 kecamatan yang tersebar di kabupaten Sidoarjo, maka sebagian besar area lahan di kabupaten Sidoarjo masuk dalam area berkategori sedang dan rendah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sedangkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan lahan yang sengaja ditetapkan dengan berdasar pada beberapa faktor dan harus dilindungi sehingga mampu menghasilkan pangan untuk kebutuhan dan ketahanan pangan negara.

Hasil dari skoring yang didapat untuk LP2B, dari 18 kecamatan yang ada hanya terdapat dua kecamatan yang masuk dalam LP2B kategori tinggi, yaitu Kecamatan Krembung dan Kecamatan Wonoayu.

c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penentuan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan berdasarkan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Akumulasi dari hasil skoring LCP2B dan LP2B merupakan hasil dari KP2B, yang mana LCP2B memiliki tiga kriteria dalam menentukan tingkatan, sedangkan LP2B memiliki tujuh kriteria.

Penentuan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan proses perencanaan, penetapan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, dan pengawasan lahan pertanian pangan sekaligus kawasannya secara berkelanjutan. Tujuan adanya penentuan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk

melindungi lahan pertanian pangan dalam mempertahankan ketahanan pangan nasional

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kecamatan yang termasuk dalam potensi KP2B tertinggi yaitu Kecamatan Krembung sebesar 6.1% dan terendah Kecamatan Tulangan sebesar 5,0%. Dilihat melalui akumulasi hasil melalui data intensitas penanaman, Kecamatan Krembung setidaknya dua kali dalam satu tahun sedangkan kecamatan Tulangan hanya satu kali. Sedangkan ditinjau melalui ketersediaan dan kebutuhan beras, Kecamatan krembung menaglami surplus sedangkan tulangan mengalami defisit. Secara keseluruhan, kecamatan krembung berada di ujung selatan Kabupaten Sidoarjo, sehingga untuk penduduk dan laju konversi lahan, perkembangannya tidak terlalu cepat. Sedangkan untuk Kecamatan tulangan, setidaknya sudah mengarah ke kota, untuk penggunaan lahan cukup cepat mengalami perubahan dan jumlah penduduk juga cukup cepat dalam mengalami peningkatan.
2. Secara keseluruhan, lebih dari setengah kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo mengalami defisit dan hanya beberapa mengalami surplus. Bagaimanapun, kecamatan lain yang mengalami surplus dan berkriteria memiliki potensi tinggi dalam KP2B tidak mampu memenuhi kebutuhan beras dari keseluruhan Kabupaten Sidoarjo.

Saran

Hasil kategori yang didapatkan melalui proses skoring pada setiap varibael, diharapkan membantu dalam meningkatkan kualitas pangan di Kabupaten Sidoarjo. Kawasan pertanian yang telah masuk dalam kategori sedang maupun rendah lebih optimal sehingga kawasan tersebut tetap berguna dan menghagsilkan tanaman pangan.

Pemenuhan kebutuhan pangan atau ketersediaan beras pada Kecamatan yang mengalami defisit, yang mana tidak bisa jika hanya mengandalkan dari Kecamatan lain yang mengalami surplus, maka harus mendatangkan pasokan beras dari wilayah lain sehingga ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk Kabupaten Sidoarjo tetap terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2017. *Jawa Timur dalam Angka tahun 2017*. Provinsi Jawa timur

- Syairwan, I. (2017). *Lahan Pertanian di Sidoarjo Menyusut, Begini Respon Dinas Pertanian*. Surabaya: Surabaya Metro.
- Zulfikar, M., Barus, B., & Sutandi, A. (2013). *Pemetaan Lahan Sawah dan Potensinya untuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat*. Kota Penerbit: Penerbit
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan
- Purwadi, S. H., Kardono, P., Karsidi, A., Haryani, N. S., & Rokhmatuloh. (2015). *Aplikasi Penginderaan Jauh Sistem Informasi Geografis untuk Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Polimedia Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)

